



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 123-129

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Analisis Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia: Studi Literatur Era Digital

Dina Mai Liza, Hendra Riofita

Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

[dinamailiza5@gmail.com](mailto:dinamailiza5@gmail.com), [hendrariofita@yahoo.com](mailto:hendrariofita@yahoo.com)

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara mendalam mengenai pengaruh investasi terhadap kapasitas penyerapan tenaga kerja di Indonesia melalui pendekatan studi literatur yang komprehensif. Sebagai pilar utama dalam struktur ekonomi nasional, investasi secara teoretis diposisikan sebagai stimulan bagi penciptaan lapangan kerja baru serta akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif di berbagai wilayah. Namun, hasil sintesis terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa efektivitas penanaman modal dalam menekan angka pengangguran tidak bersifat absolut, melainkan sangat bergantung pada beragam variabel pendukung lainnya. Faktor makroekonomi seperti kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP), kualitas modal manusia yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta tingkat pendidikan masyarakat menjadi penentu utama efisiensi dampak investasi tersebut. Di tengah gelombang transformasi industri, kajian ini juga menyoroti peran strategis ekosistem ekonomi digital dan literasi keuangan sebagai instrumen kontemporer dalam memperluas jangkauan kesempatan kerja. Selain itu, integrasi prinsip kewirausahaan syariah pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas ekonomi berbasis kerakyatan. Studi ini menyimpulkan bahwa untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja secara berkelanjutan, diperlukan kolaborasi strategis antara peningkatan arus investasi fisik, penguatan kompetensi sumber daya manusia melalui jalur pendidikan, serta pemanfaatan teknologi keuangan yang inklusif. Harmonisasi kebijakan yang mengintegrasikan penguatan sektor makro dan digitalisasi pada unit UMKM menjadi kunci dalam meminimalkan disparitas antara pertumbuhan modal dan ketersediaan okupasi di pasar kerja Indonesia. Dengan demikian, investasi yang berkualitas harus mampu menciptakan nilai tambah sekaligus meningkatkan produktivitas tenaga kerja secara masif. Sinergi multidimensi ini diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan secara nasional.*

*Kata kunci: Investasi, Penyerapan Tenaga Kerja, Pertumbuhan Ekonomi, Ekonomi Syariah, Investasi Digital.*

### **1. Latar Belakang**

Masalah penyerapan tenaga kerja masih menjadi tantangan serius bagi perekonomian Indonesia yang terus berkembang. Investasi sering kali dipandang sebagai solusi utama karena dianggap mampu menggerakkan roda produksi dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat [1]. Secara teori, semakin tinggi modal yang masuk ke suatu daerah, maka aktivitas ekonomi akan meningkat dan secara otomatis menarik lebih banyak pekerja [2]. Namun pada kenyataannya, kaitan antara investasi dan tenaga kerja tidak selalu sesederhana itu, karena sering kali pertumbuhan modal tidak dibarengi dengan jumlah serapan tenaga kerja yang signifikan di lapangan [4, 6].

Faktor lain yang sangat menentukan efektivitas investasi adalah kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan kualitas sumber daya manusia melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Investasi yang besar cenderung memerlukan tenaga kerja yang memiliki kompetensi tertentu, sehingga pendidikan menjadi kunci utama agar masyarakat lokal tidak terlibat secara optimal di tengah masuknya modal [11, 16]. Di beberapa wilayah, tingginya upah minimum juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi investor dalam menentukan skala rekrutmen pekerja, yang terkadang menyebabkan penyerapan tenaga kerja menjadi terhambat meski investasi terus mengalir [13, 14].

Di era transformasi digital saat ini, perspektif mengenai investasi pun mulai bergeser tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga pada penguatan ekonomi digital dan teknologi keuangan. Literasi keuangan digital dan penggunaan platform fintech terbukti memberikan dampak positif bagi performa UMKM dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya [8, 9]. Sektor-sektor modern ini menjadi mesin baru dalam penyerapan tenaga kerja,

terutama melalui pemanfaatan teknologi yang mempermudah akses modal dan perluasan pasar secara inklusif di berbagai lapisan masyarakat [7, 10].

Selain itu, prinsip-prinsip ekonomi syariah juga mulai menunjukkan pengaruhnya dalam perilaku konsumsi dan operasional bisnis di Indonesia. Adanya kepercayaan konsumen terhadap sistem yang sesuai syariah, baik di marketplace maupun lembaga keuangan, memberikan perlindungan tambahan bagi stabilitas usaha kecil dan menengah [15]. Hal ini penting karena kestabilan usaha di sektor mikro dan kecil merupakan fondasi utama bagi penyerapan tenaga kerja di Indonesia yang sangat bergantung pada sektor domestik dibandingkan sektor industri besar yang padat modal [3, 12]. Meskipun banyak studi telah membahas dampak investasi secara parsial di tingkat provinsi, masih sedikit kajian yang merangkum fenomena ini secara menyeluruh dengan menghubungkan aspek ekonomi makro dan perkembangan ekonomi digital. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada upaya mensintesis berbagai literatur terkait investasi fisik, kebijakan upah, hingga pengaruh teknologi keuangan dalam satu kajian literatur [5]. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana berbagai bentuk investasi tersebut saling memengaruhi penyerapan tenaga kerja, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih utuh bagi kebijakan ekonomi ke depan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (literature review) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Proses penelitian dilakukan melalui empat tahapan utama: identifikasi, penyaringan (screening), penilaian kelayakan, dan sintesis data dari artikel ilmiah yang relevan dengan topik investasi dan tenaga kerja di Indonesia [4], [5]. Sumber data primer diperoleh dari basis data jurnal digital seperti Google Scholar, Neliti, dan portal jurnal universitas dengan rentang waktu publikasi dominan lima tahun terakhir untuk menjaga aktualitas data [6]. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kata kunci spesifik seperti “investasi”, “penyerapan tenaga kerja”, dan “ekonomi digital” guna menemukan literatur yang saling berkaitan. Dari hasil pencarian awal, dipilih 16 artikel referensi yang memenuhi kriteria inklusi, yaitu artikel yang membahas dampak investasi secara makro maupun pengaruh variabel pendukung seperti kebijakan upah dan literasi keuangan digital. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk membandingkan temuan antar peneliti dan menarik kesimpulan yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

Setiap literatur yang dipilih dibedah berdasarkan variabel penelitian, metode yang digunakan oleh peneliti terdahulu, serta hasil temuan kuncinya. Proses sintesis dilakukan dengan mengelompokkan literatur ke dalam beberapa tema, yaitu investasi fisik, peran sumber daya manusia, dan dampak teknologi digital terhadap sektor UMKM. Langkah-langkah sistematis ini memastikan bahwa hasil ulasan memiliki dasar ilmiah yang kuat meskipun tidak melalui pengujian statistik secara langsung.

Penentuan kelayakan artikel didasarkan pada relevansi isi naskah terhadap judul penelitian, yaitu pengaruh investasi terhadap tenaga kerja di Indonesia. Penulis memastikan bahwa referensi yang digunakan mencakup studi kasus di berbagai wilayah dan sektor, termasuk sektor ekonomi syariah dan digital yang sedang berkembang. Hal ini dilakukan untuk menghindari bias informasi dan memberikan gambaran yang lebih luas mengenai kondisi pasar kerja nasional.

## 3. Hasil dan Diskusi

Dari hasil penelusuran terhadap 16 referensi yang ada, terlihat sebuah pola yang jelas: investasi memang masuk ke Indonesia, tapi "buahnya" tidak selalu dinikmati oleh tenaga kerja lokal. Secara data, investasi seringkali hanya memperbesar angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), namun tidak otomatis mengurangi antrean pencari kerja secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa ada hambatan besar antara modal yang masuk dengan penyerapan manusia di lapangan.

### 3.1. Analisis Kritis: Paradox Investasi dan Realitas Pengangguran Struktural

Berdasarkan data yang ada naiknya angka investasi di Indonesia tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. Fenomena ini menciptakan sebuah paradox; di satu sisi pemerintah membanggakan triliunan rupiah yang masuk, namun di sisi lain, gerbang pabrik justru semakin tertutup bagi lulusan lokal [1], [4]. Masalahnya terletak pada ketimpangan antara modal yang masuk dengan daya serap tenaga kerja yang ada. Investasi saat ini lebih banyak berbentuk mesin otomatis dan sistem digital canggih yang hanya butuh segelintir operator, sehingga

ribuan pencari kerja yang berharap pada lowongan kasar atau administratif terpaksa tidak memperoleh peluang kerja yang diharapkan karena posisi mereka telah digantikan oleh efisiensi teknologi [2], [6].

Kondisi ini diperparah dengan model investasi di sektor ekstraktif, seperti pertambangan dan industri alat berat, yang sifatnya sangat padat modal. Investasi semacam ini memang menyumbang angka pertumbuhan ekonomi yang besar bagi daerah, namun dampak sosialnya sangat minim karena mereka hanya mencari tenaga kerja ahli dengan spesifikasi tinggi yang jarang tersedia di wilayah tersebut [3], [5]. Akhirnya, perusahaan lebih memilih “mengimpor” tenaga kerja terampil dari luar daerah atau luar negeri, sementara pemuda setempat hanya bisa menjadi penonton atau pekerja kasar dengan kontrak jangka pendek yang tidak memberikan jaminan masa depan [12], [16].

Dilema Upah Minimum Provinsi (UMP) juga menjadi faktor yang sering kali menjepit posisi tawar tenaga kerja. Masyarakat memang berhak menuntut upah yang manusiawi untuk hidup layak, namun tidak dapat diabaikan bahwa bagi investor, upah adalah variabel biaya [13]. Ketika UMP naik tanpa diiringi dengan lonjakan produktivitas atau keahlian yang nyata, daya tarik investasi ke Indonesia akan merosot dibandingkan negara tetangga [14]. Akibatnya, banyak perusahaan manufaktur yang lebih memilih melakukan “relokasi” atau pindah ke wilayah yang upahnya lebih murah, yang pada ujungnya justru memicu gelombang PHK massal dan memperpanjang barisan pengangguran [13], [16]. Secara lebih dalam, kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia masih menjadi hambatan besar yang belum terselesaikan.

Pendidikan sering kali hanya mencetak lulusan yang mengandalkan ijazah tanpa memiliki skill teknis yang benar-benar dibutuhkan oleh industri modern [11]. Ada jarak yang lebar antara apa yang dipelajari di bangku kuliah dengan kebutuhan nyata di lapangan kerja [16]. Tanpa adanya pembenahan serius pada kurikulum pendidikan dan pelatihan kerja yang relevan, investasi sebesar apa pun hanya akan menjadi ajang bagi pihak luar untuk mengeruk keuntungan tanpa memberikan kesempatan bagi anak bangsa untuk berkembang [11], [12]. Namun, di tengah kebuntuan sektor industri besar, sektor ekonomi digital dan UMKM muncul sebagai alternatif solusi dalam perekonomian yang menjaga ekonomi agar tidak runtuh [8]. Investasi pada platform digital telah membuka jalan bagi masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja sendiri secara mandiri tanpa harus bergantung pada lamaran kerja formal [9]. Literasi digital dan akses terhadap modal finansial berbasis teknologi memberikan kesempatan bagi usaha kecil untuk tumbuh lebih gesit [8]. Sektor inilah yang sebenarnya memiliki elastisitas tenaga kerja yang lebih tinggi karena mampu menyerap orang-orang yang terlempar dari persaingan industri padat modal [9], [12].

Integrasi nilai ekonomi syariah dalam bisnis digital memberikan dimensi baru dalam menjaga keadilan pasar kerja [15]. Bisnis yang mengutamakan sistem bagi hasil dan etika kejujuran cenderung lebih stabil karena tidak hanya berorientasi pada profit jangka pendek yang sering berujung pada efisiensi karyawan secara sepihak [7], [10]. Dengan membangun ekosistem bisnis yang lebih manusiawi dan berbasis teknologi, Indonesia punya peluang untuk memutus rantai pengangguran [15]. Penyerapan tenaga kerja tidak akan pernah maksimal jika masyarakat hanya mengejar angka investasi, tanpa berani memperbaiki kualitas manusia dan mendukung penuh sektor ekonomi kerakyatan yang berbasis digital dan syariah [10], [15].

### **3. 2. Sektor Digital dan Syariah: Mesin Baru Penyerapan Tenaga Kerja**

Kondisi menyebabkan masyarakat tidak bisa lagi hanya menggantungkan harapan pada pabrik-pabrik besar yang saat ini justru banyak melakukan efisiensi tenaga kerja [4]. Di tengah ketidakpastian industri konvensional, sektor ekonomi digital muncul sebagai "sektor yang berperan penting dalam perekonomian"[8]. Investasi pada infrastruktur teknologi dan literasi keuangan bukan lagi sekadar tren gaya hidup, melainkan kebutuhan darurat untuk menyelamatkan nasib para pencari kerja [9].

Digitalisasi memungkinkan terciptanya ekosistem ekonomi baru di mana siapa pun, tanpa harus menunggu panggilan kerja dari perusahaan besar, dapat menciptakan lapangan kerja sendiri melalui kreativitas dan akses internet [8], [12]. Kekuatan utama dari ekonomi digital terletak pada kemampuannya menyentuh sektor UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia [8]. Lewat kehadiran marketplace dan sistem pembayaran digital (fintech), hambatan modal fisik yang selama ini menjegal pengusaha kecil mulai terkikis [9]. Hal ini memberikan dampak domino pada penyerapan tenaga kerja di sektor informal, mulai dari admin toko daring, tenaga pengemasan, hingga jasa logistik lokal [12].

Investasi digital ini jauh lebih "merakyat" karena tidak membutuhkan syarat ijazah yang kaku atau pabrik yang luas, melainkan kecakapan dalam memanfaatkan peluang di pasar yang tanpa batas [9]. Namun, digitalisasi saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan pondasi etika yang kuat, di sinilah peran ekonomi syariah menjadi sangat krusial [15]. Dalam berbagai situasi krisis, bisnis yang dijalankan dengan prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan sistem bagi hasil yang terbukti jauh lebih tahan banting dibandingkan sistem yang hanya mengejar profit maksimal [7]. Hal ini terjadi karena adanya ikatan moral dan rasa saling percaya yang tinggi antara pengusaha dan pekerja [10]. Dalam sistem syariah, pekerja bukan dianggap sebagai beban biaya yang harus segera dipangkas saat untung menurun, melainkan mitra yang diajak berjuang bersama untuk keberlangsungan usaha [7], [15].

Prinsip bagi hasil dalam ekonomi syariah juga menjadi pelindung bagi stabilitas pasar kerja [10]. Saat kondisi ekonomi sedang sulit, mekanisme ini mencegah terjadinya PHK massal secara sepihak yang sering terjadi di perusahaan padat modal konvensional [15]. Dengan adanya pembagian risiko yang adil, usaha kecil dan menengah memiliki napas yang lebih panjang untuk bertahan hidup [7]. Investasi pada sistem syariah ini pada dasarnya adalah investasi pada ketahanan sosial, di mana keberlangsungan hidup orang banyak lebih diutamakan daripada sekadar mengejar angka dividen bagi para pemegang saham di kota besar [10]. Sinergi antara teknologi digital dan nilai-nilai syariah inilah yang sebenarnya menjadi solusi jangka panjang bagi masalah pengangguran di Indonesia [15]. Ketika teknologi mempermudah akses pasar dan nilai syariah menjaga keadilan distribusi keuntungan, maka akan tercipta lingkungan kerja yang lebih manusiawi dan merata [7]. Sektor jasa digital syariah, seperti fintech syariah dan halal marketplace, kini mulai menarik minat investor karena kestabilannya yang lebih teruji [10]. Ini adalah bukti bahwa ekonomi Indonesia bisa tetap tumbuh tanpa harus mengorbankan hak-hak pekerja atau menciptakan kesenjangan sosial yang semakin lebar [7], [15].

### **3. 3. Tantangan Kesenjangan Keahlian dan Disparitas Investasi Antar Wilayah**

Persoalan besar yang sering luput dari pembahasan adalah adanya mismatch atau ketidaksesuaian antara dunia pendidikan dengan kebutuhan industri yang didanai oleh investasi besar [11]. Banyak investasi yang masuk ke Indonesia membawa teknologi terbaru, namun di sisi lain, kurikulum pendidikan yang masih tertinggal jauh di belakang [16]. Akibatnya, terjadi ironi di mana perusahaan kesulitan mencari tenaga ahli lokal, sementara ribuan lulusan baru justru menjadi pengangguran karena skill yang mereka miliki tidak relevan dengan kebutuhan pasar [12]. Investasi pada akhirnya tidak menjadi berkah, melainkan hanya menciptakan ketergantungan pada tenaga kerja ahli dari luar yang dianggap lebih siap pakai [5], [11].

Kesenjangan ini diperparah dengan kenyataan bahwa investasi di Indonesia masih sangat terpusat di wilayah tertentu, terutama di Pulau Jawa [1], [6]. Ketimpangan sebaran modal ini menyebabkan terjadinya penumpukan angkatan kerja di satu titik, sementara daerah lain yang kaya akan sumber daya alam justru kekurangan investasi yang padat karya [4]. Ketika investasi masuk ke luar Jawa, sering kali hanya fokus pada pengerukan sumber daya alam (sektor ekstraktif) yang tidak membutuhkan banyak orang untuk bekerja [3]. Hal ini menciptakan ketimpangan sosial di mana daerah yang menyumbang angka investasi besar justru tidak merasakan dampak nyata pada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di wilayahnya sendiri [2], [14].

Menyoroti peran pemerintah dalam menjembatani antara investor dengan sekolah vokasi atau universitas [11]. Selama ini, hubungan antara keduanya masih sebatas formalitas tanpa adanya kerja sama strategis dalam penyusunan kurikulum yang "link and match" [16]. Investor sering kali dibiarkan membawa standar kerjanya sendiri tanpa ada kewajiban yang kuat untuk melakukan transfer teknologi kepada pekerja lokal [5]. Jika pola ini terus berlanjut, maka tenaga kerja Indonesia selamanya hanya akan mengisi posisi-posisi kelas bawah dengan upah rendah, sementara posisi strategis dan manajerial tetap dikuasai oleh pihak yang memiliki akses terhadap pendidikan lebih tinggi atau modal asing [11], [13].

Daya saing tenaga kerja Indonesia juga sering kali kalah telak bukan karena masyarakat kurang pintar, melainkan karena kurangnya akses terhadap sertifikasi profesi yang diakui secara internasional [16]. Investasi asing biasanya menuntut standar kualitas yang ketat, dan banyak tenaga kerja lokal yang gugur di tahap administrasi hanya karena tidak memiliki sertifikat keahlian meskipun mereka punya pengalaman [11]. Di sinilah letak kegagalan investasi dalam menyerap tenaga kerja; ia menciptakan standar yang tinggi namun tidak ikut membangun jembatan agar masyarakat bisa mencapai standar tersebut [12]. Tanpa adanya kewajiban bagi investor untuk memberikan pelatihan kerja bagi masyarakat sekitar, investasi hanya akan menjadi entitas asing yang eksklusif di tengah pemukiman warga [5]. Selain itu, perlu melihat bagaimana stabilitas politik dan kepastian hukum di daerah memengaruhi keberanian investor untuk mempekerjakan lebih banyak orang [14].

Ketidakpastian aturan sering kali membuat investor memilih untuk "main aman" dengan membatasi jumlah karyawan tetap dan lebih banyak menggunakan sistem alih daya (outsourcing) atau kontrak jangka pendek [13]. Hal ini tentu sangat merugikan bagi pencari kerja, karena meskipun mereka bekerja di perusahaan yang mendapat investasi besar, mereka tidak memiliki kepastian pendapatan dan perlindungan sosial yang layak [13], [16]. Investasi dalam konteks ini justru menciptakan pasar kerja yang rapuh dan penuh ketidakpastian. Sebagai solusi atas berbagai tantangan tersebut, diperlukan perombakan besar-besaran dalam kebijakan investasi yang berbasis pada "Keadilan Tenaga Kerja" [10]. Pemerintah tidak boleh hanya bangga dengan total nilai investasi yang masuk, tapi harus mulai menghitung berapa banyak tenaga kerja lokal yang benar-benar terserap di posisi produktif [5]. Sinergi antara kebijakan upah yang adil [13], peningkatan IPM yang fokus pada keahlian teknis [11], serta kemudahan akses bagi UMKM digital syariah adalah satu-satunya jalan keluar [15]. Jika ketiga hal ini dilakukan, maka investasi tidak lagi hanya menjadi angka statistik yang dingin, melainkan menjadi mesin nyata yang benar-benar membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke [10].

### 3. 4. Ketergantungan Modal Asing dan Tantangan Kedaulatan

Tenaga Kerja Lokal Satu hal yang sering kali luput dari pujian terhadap angka investasi adalah besarnya porsi Foreign Direct Investment (FDI) atau investasi asing dalam struktur ekonomi negara [4], [6]. Secara kritis, perlu dikaji lebih lanjut, apakah masuknya modal asing benar-benar membawa kemakmuran bagi pekerja domestik atau justru menciptakan bentuk ketergantungan baru [12]. Literasi ekonomi menunjukkan bahwa modal asing cenderung bersifat sangat sensitif dan "mudah lari" (capital flight) apabila terjadi gejolak politik atau tuntutan upah yang meningkat [13], [14]. Ketidakstabilan ini menciptakan rasa was-was bagi tenaga kerja lokal; mereka bekerja di bawah bayang-bayang ancaman penutupan perusahaan jika iklim bisnis dianggap tidak lagi menguntungkan bagi pemilik modal di luar negeri [14].

Ketergantungan pada investasi asing juga sering kali dibarengi dengan persyaratan teknologi dan manajemen yang sangat kaku [16]. Sering kali, perusahaan asing membawa standar operasional global yang belum tentu cocok dengan kultur dan tingkat keahlian tenaga kerja di Indonesia [11]. Akibatnya, alih-alih terjadi transfer teknologi yang bermanfaat, yang terjadi justru adalah pengkotak-kotakan kerja di mana tenaga kerja lokal hanya ditempatkan pada posisi operasional kasar yang berulang, sementara posisi strategis yang membutuhkan analisis tinggi tetap dikuasai oleh ekspatriat [5], [11]. Hal ini mencerminkan bahwa investasi asing belum sepenuhnya mampu mengangkat martabat tenaga kerja Indonesia ke level yang lebih tinggi dalam rantai pasok global [12]. Selain itu, perlu juga menyoroti persaingan antar daerah yang terkadang justru merugikan tenaga kerja itu sendiri [1].

Dalam upaya menarik minat investor, banyak pemerintah daerah yang terjebak dalam perlombaan "obral" kemudahan, mulai dari insentif pajak hingga pelonggaran aturan lingkungan dan ketenagakerjaan [13]. Secara kritis, ini bisa menjadi perlombaan menuju titik terendah (race to the bottom), di mana perlindungan terhadap hak-hak pekerja sering kali dikorbankan demi menjaga angka investasi tetap tinggi di wilayah tersebut [14]. Jika perlindungan kerja terus ditekan demi menyenangkan investor, maka investasi bukan lagi alat kesejahteraan, melainkan menjadi alat eksploitasi yang legal. Dampak dari pola investasi yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek ini juga terlihat pada rapuhnya loyalitas perusahaan terhadap karyawannya [2]. Sistem kerja kontrak dan alih daya (outsourcing) menjadi sangat dominan dalam industri yang didanai investasi asing agar mereka bisa dengan mudah menyesuaikan jumlah pekerja dengan fluktuasi pasar global [13], [16]. Bagi mahasiswa dan pencari kerja masa kini, ini adalah kondisi yang kurang menguntungkan; mereka masuk ke dunia kerja tanpa adanya jaminan pensiun atau jenjang karir yang jelas. Investasi yang besar ternyata tidak menjamin adanya keamanan finansial jangka panjang bagi mereka yang menjalankan roda produksinya [16]. Namun, di sisi lain, investasi tetap diperlukan dalam perekonomian jika ingin ekonomi tetap bergerak [4]. Solusi kritisnya bukan dengan menolak investasi, melainkan dengan memperkuat daya tawar nasional melalui kedaulatan ekonomi digital [8], [9].

Investasi pada sektor digital lokal dan startup berbasis syariah seharusnya lebih didorong daripada sekadar mengandalkan pabrik perakitan asing [10], [15]. Dengan memperkuat modal di tangan anak bangsa sendiri, keputusan-keputusan strategis mengenai penyerapan tenaga kerja tidak lagi ditentukan di kantor pusat yang berada di negara lain, melainkan ditentukan oleh visi untuk membangun kemandirian ekonomi nasional yang lebih bermartabat [10]. Pada akhirnya, penyerapan tenaga kerja di Indonesia memerlukan keberanian untuk melakukan reorientasi kebijakan investasi yang lebih berpihak pada rakyat [5].

Pemerintah harus mulai memberlakukan syarat yang lebih ketat bagi investor terkait kewajiban pengembangan komunitas dan peningkatan skill pekerja lokal secara nyata [11]. Investasi tidak boleh hanya dianggap sebagai tamu yang datang untuk mengambil keuntungan lalu pergi, tetapi harus menjadi bagian dari keluarga yang ikut

bertanggung jawab atas masa depan generasi muda Indonesia [10]. Hanya dengan pengawasan yang ketat dan keberpihakan pada sektor digital-syariah yang mandiri, masyarakat bisa memastikan bahwa investasi benar-benar menjadi jembatan menuju Indonesia yang lebih adil dan makmur [15].

### 3. 5. Dampak Sosial-Psikologis dan Ketidakpastian Masa Depan Angkatan Kerja

Satu hal yang jarang sekali dibahas dalam laporan ekonomi namun sangat terasa di lapangan adalah dampak psikologis dari investasi yang bersifat kontrak atau jangka pendek. Ketika investasi masuk dengan sistem outsourcing, ia sebenarnya sedang menciptakan generasi yang penuh dengan kecemasan [13]. Mahasiswa yang lulus saat ini tidak lagi bermimpi tentang karir yang stabil hingga tua, melainkan dipengaruhi oleh ketidakpastian dan rasa takut akan diputus kontrak kapan saja [16]. Ketidakpastian ini membuat daya beli masyarakat tidak pernah benar-benar kuat, karena orang cenderung takut membelanjakan uangnya untuk masa depan akibat tidak adanya jaminan penghasilan yang tetap dari hasil investasi tersebut [12], [14].

Secara sosial, fenomena ini juga memicu terjadinya urbanisasi besar-besaran yang tidak sehat. Banyak pemuda desa yang tergiur oleh berita investasi besar di kota, namun saat sampai di sana, mereka hanya menjadi tenaga kontrak yang sewaktu-waktu bisa dibuang [1]. Investasi yang tidak dibarengi dengan pembangunan ekonomi di perdesaan akhirnya hanya menciptakan penumpukan kemiskinan baru di pinggiran kota [2]. Hal ini menjadi bukti bahwa selama ini masyarakat terlalu fokus mengejar nilai investasi nasional, namun lupa memastikan apakah investasi tersebut mampu menciptakan kebahagiaan dan stabilitas sosial bagi keluarga-keluarga di daerah asal tenaga kerja [6]. Kritik tajam juga perlu diarahkan pada mentalitas “buruh murah” yang seolah dipelihara demi menjaga daya tarik investasi [13].

Jika Indonesia terus-menerus mempromosikan diri sebagai negara dengan tenaga kerja yang murah, maka masyarakat sebenarnya sedang menjebak bangsa sendiri dalam lingkaran kemiskinan sistemik [14]. Investasi yang hanya mencari upah murah biasanya tidak akan membawa teknologi tinggi atau ilmu baru; mereka hanya datang untuk memeras tenaga lalu pergi saat ada negara lain yang menawarkan harga lebih rendah [5]. Pola ini sangat merugikan bagi mahasiswa semester akhir yang seharusnya dipersiapkan menjadi pemimpin ekonomi, bukan sekadar menjadi baut kecil dalam mesin industri asing [11]. Di sinilah letak pentingnya literasi keuangan dan ekonomi digital syariah sebagai solusi mentalitas [8].

Dengan adanya investasi pada sektor digital, anak muda didorong untuk memiliki mentalitas sebagai “pemilik” atau entrepreneur, bukan sekadar pemohon kerja [9]. Sektor digital syariah memberikan ruang bagi tumbuhnya kemandirian ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai keadilan [10]. Orang tidak lagi hanya bergantung pada belas kasihan korporasi besar, tetapi bisa membangun jejaring ekonomi sendiri yang lebih manusiawi [15]. Pergeseran mentalitas dari buruh menjadi pelaku ekonomi mandiri adalah hasil investasi jangka panjang yang paling berharga bagi bangsa ini [7], [15]. Namun, transisi ini tidak akan terjadi jika pemerintah tidak berani menekan para investor untuk memberikan perlindungan sosial yang lebih baik [13].

Investasi harus dipaksa untuk ikut mendanai asuransi kesehatan, jaminan hari tua, dan pelatihan berkelanjutan bagi pekerjanya [5]. Tanpa perlindungan ini, investasi hanyalah bentuk eksploitasi modern yang terbungkus rapi dalam angka pertumbuhan ekonomi [14]. Masyarakat perlu menuntut komitmen nyata dari setiap lembar modal yang masuk agar mereka tidak hanya mengambil kekayaan alam dan tenaga kerja Indonesia, tetapi juga ikut bertanggung jawab membangun martabat manusia Indonesia [11], [12].

Sebagai penutup analisis, penyerapan tenaga kerja harus dipandang sebagai sebuah hak asasi, bukan sekadar angka statistik [11]. Investasi yang baik adalah investasi yang mampu membuat seorang ayah bisa pulang dengan tenang karena tahu pekerjaannya aman, dan membuat seorang lulusan universitas merasa ilmunya dihargai [16]. Sinergi antara kebijakan makro yang tegas [6], dukungan penuh pada UMKM digital [8], dan penerapan etika syariah adalah kunci untuk mengubah kutukan “investasi tanpa lapangan kerja” menjadi berkah kemakmuran yang nyata [10], [15]. Masa depan ekonomi Indonesia ada di tangan yang berani mengkritisi sistem dan membangun alternatif ekonomi yang lebih adil bagi semua.

## 4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa investasi di Indonesia memiliki korelasi yang positif, namun tidak selalu elastis terhadap penyerapan tenaga kerja. Fakta menunjukkan bahwa pertumbuhan nilai investasi yang tinggi, baik

melalui penanaman modal asing maupun dalam negeri, sering kali terjebak dalam model padat modal yang lebih mengutamakan teknologi otomatisasi dibandingkan tenaga kerja manusia. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan penyerapan kerja bagi angkatan kerja lokal yang belum memiliki sertifikasi keahlian khusus. Di sisi lain, sektor ekonomi digital dan kewirausahaan syariah terbukti menjadi alternatif solusi dalam penyerapan tenaga kerja yang efektif di tingkat mikro melalui pemberdayaan UMKM. Oleh karena itu, investasi hanya akan berdampak signifikan pada pengurangan pengangguran jika diikuti dengan peningkatan kualitas modal manusia yang relevan dengan kebutuhan industri modern serta dukungan penuh terhadap ekosistem digital yang inklusif. Implikasi dari temuan ini menekankan pentingnya reorientasi kebijakan pemerintah agar tidak hanya berfokus pada kuantitas modal yang masuk, tetapi juga pada kualitas serapan tenaga kerja produktif melalui syarat transfer teknologi yang ketat bagi investor. Spekulasi yang muncul adalah jika tren investasi padat modal terus berlanjut tanpa dibarengi dengan pembenahan kurikulum pendidikan vokasi yang link and match, maka Indonesia akan menghadapi tantangan pengangguran struktural yang lebih berat di masa depan. Aplikasi praktis dari penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi pengambil kebijakan untuk memberikan insentif khusus bagi sektor-sektor investasi yang memiliki rasio penyerapan tenaga kerja tinggi. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan analisis komparatif yang lebih spesifik mengenai efektivitas investasi digital syariah di berbagai daerah di luar Pulau Jawa guna memetakan potensi pemerataan lapangan kerja secara nasional.

## Referensi

1. A. Yolanda, S. Mariam, dan H. Fuady, "Pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi NTB tahun 2014–2023," *Jurnal Oportunitas: Ekonomi Pembangunan*, vol. 4, no. 1, Maret 2025. <https://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/oportunitas/article/view/1589>
2. R. Sulistiawati, "Pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan masyarakat di provinsi di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, vol. 3, no. 1, pp. 29–50, 2012. <https://doi.org/10.26418/jebik.v3i1.9888>
3. Z. Yasir dan Idariyani, "Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Indonesia," *Journal of Islamic Business and Economic Studies*, vol. 3, no. 1, 2024. <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/JIBES/article/view/4903>
4. F. Taqiyuddin, "Analisis pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja melalui variabel produk domestik regional bruto di Indonesia," *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, vol. 7, no. 1, pp. 95–105, Mar. 2023. <https://doi.org/10.22219/jie.v7i01.23006>
5. R. S. Ginting, W. J. Tarigan, dan M. Sinaga, "Analisis faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Indonesia," *Jurnal Ilman: Jurnal Ilmu Manajemen*, vol. 13, no. 2, 2025. <https://www.journals.stimsukmamedan.ac.id/index.php/ilman/article/view/946>
6. L. M. Harahap, G. K. D. Harahap, S. K. Adilla, dan Syafika, "Pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Manajemen*, vol. 4, no. 5, 2025. <https://doi.org/10.56799/jim.v4i5.8643>
7. H. Riofita, "Perceived opportunity and risk control role on willingness to recommend sharia fintech," *Jurnal Ekonomi Indonesia*, vol. 13, no. 2, 2024. <https://doi.org/10.52813/jei.v13i2.353>
8. S. S. Alam dkk., "The impact of digital finance on the performance of MSMEs: the moderating role of financial literacy," *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, vol. 15, no. 1, 2024. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/5869>
9. I. T. Lubis, E. H. Ningsi, L. Manurung, dan S. Widodo, "Manajemen keuangan digital UMKM: dampak literasi keuangan dan teknologi keuangan," *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, vol. 7, no. 2, pp. 1164–1172, 2024. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v7i2.870>
10. H. Riofita, "How Shariah-compliant digital payments influence Muslim customer's purchase decision for micro, small and medium enterprises (MSMEs) products through Sharia entrepreneurship principles," *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2025. <https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2024-0202>
11. D. Syarif, "Pengaruh investasi dalam negeri terhadap jumlah penduduk bekerja dan indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2005–2023 dengan PDB sebagai variabel intervening," *Inovatif: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, vol. 4, no. 4, pp. 5799–5812, Jul. 2024. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13599>
12. B. I. Budiwati, A. F. Hazami, Z. Ardiance, dan L. Khoirunnisa, "Analisis pengaruh investasi asing langsung (FDI) terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di Indonesia (2020–2024)," *IKRAITH-HUMANIORA*, vol. 9, no. 3, Nov. 2025. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/5869>
13. M. Y. Pratama, D. Rahmi, dan I. Amaliah, "Pengaruh investasi, upah minimum provinsi (UMP), dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa tahun 2010–2020," *Bandung Conference Series: Economics Studies*, vol. 2, no. 1, 2022. <https://doi.org/10.29313/bcses.v2i1.1406>
14. M. F. R. Afrizal dan M. I. Hasmarini, "Analisis pengaruh investasi, indeks pembangunan manusia, upah minimum provinsi dan produk domestik regional bruto terhadap penyerapan tenaga kerja Provinsi DKI Jakarta," *Jurnal Penelitian Ilmu Inovatif Sosial*, vol. 4, no. 1, pp. 9257–9268, Feb. 2024. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8466>
15. H. Riofita, "Predicting Muslim Female Customer Retention Through Islamic Marketplace Attractiveness," *JIEBR*, vol. 4, no. 2, pp. 234–247, Dec. 2024. <https://doi.org/10.18196/jiebr.v4i2.282>
16. Halim, A. Soleh, M. Mukti, dan M. Syafii, "Hubungan investasi, pendidikan dan upah terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Provinsi Jambi," *Jurnal Pembangunan*, vol. 13, no. 1, pp. 34–44, Jun. 2025. <https://doi.org/10.53978/jd.v13i1.577>